

EKONOMI PANCASILA DI TENGAH ARUS KAPITALISME PASAR

Oleh:

Syamsul Umam

(Institut Agama Islam Negeri Tulungagung)

Abstrak :

Dalam perekonomian kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Semua orang bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara, Pengertian kompetisi dalam moral Pancasila bukan dan tidak sama dengan *free fight competition a la* barat yang di dalamnya mengandung cara-cara yang boleh merugikan pihak lain (tujuan menghalalkan cara). Hubungan dagang dalam sistem ekonomi Pancasila harus tetap dalam kerangka untuk menjalin tali silaturahmi yang selalu bernuansa saling kasih sayang dan saling menguntungkan, menghindarkan kemuspraan (kesia-siaan). Secara sederhana Ekonomi Pancasila dapat disebut sebagai sebuah sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau ekonomi pasar terkendali. Mungkin ada istilah-istilah lain yang mendekati pengertian Ekonomi Pancasila, yaitu sistem ekonomi campuran, maksudnya campuran antara sistem kapitalisme dan sosialisme atau sistem ekonomi jalan ketiga dalam bentuk Koperasi. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat sebenarnya memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkembang. Kekuatan partisipasi, totalitas, kemandirian dan kesamaan tujuan menjadi modal dasar bagi koperasi untuk bersaing dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya dalam kancah liberalisasi ekonomi. Koperasi yang menganut prinsip gotong royong, kemandirian, keadilan dan kesetaraan hak sesama

anggota menempatkan koperasi sebagai alternatif bagi tumbuhnya suatu bentuk perekonomian yang mengakomodir cita-cita masyarakat untuk memperoleh kemakmuran bersama tanpa meninggalkan aspek-aspek solidaritas, hak asasi dan demokrasi.

Keyword : *Ekonomi Pancasila, Kapitalisme Pasar*

Pengantar

Globalisasi kegiatan ekonomi dan persoalan pengelolaannya sering dianggap baru muncul setelah Perang Dunia II, khususnya pada tahun 1960-an. Masa sesudah tahun 1960-an adalah masa munculnya perusahaan Multinasional (MNC) dan berkembangnya perdagangan internasional. Kemudian, setelah sistem nilai tukar setengah-tetap Bretton Woods ditinggalkan pada tahun 1971-1973, investasi dalam bentuk surat-surat berharga internasional dan pemberian kredit oleh bank mulai berkembang dengan cepat, seiring dengan meluasnya pasar modal ke seluruh dunia, yang menambah rumit hubungan ekonomi internasional dan membuka jalan bagi globalisasi ekonomi dunia yang terintegrasi dan saling tergantung.

Revolusi komersial dan industri pada dunia modern awal dipengaruhi oleh asumsi-asumsi kapitalisme dan merkantilisme. Direduksi kepada pengertian yang sederhana, kapitalisme adalah sebuah sistem produksi, distribusi, dan pertukaran di mana kekayaan yang terakumulasi diinvestasikan kembali oleh pemilik pribadi untuk memperoleh keuntungan. Kapitalisme adalah sebuah sistem yang didisain untuk mendorong ekspansi komersial melewati batas-batas lokal menuju skala nasional dan internasional. Pengusaha kapitalis mempelajari pola-pola perdagangan internasional, di mana pasar berada dan bagaimana

memanipulasi pasar untuk keuntungan mereka.¹ Menurut Karl Marx kapitalisme tidak didefinisikan oleh motif atau orientasi kaum kapitalis. Apapun motif yang mereka sadari, mereka sebenarnya didorong oleh logika sistem ekonomi untuk memupuk modal. Kapitalisme bagi Marx suatu bentuk masyarakat kelas yang distrukturasikan dengan cara khusus di mana manusia diorganisasikan untuk produksi kebutuhan hidup

Peletak dasar teori kapitalisme adalah Adam Smith dalam risalahnya *The Wealth of Nations* (1776) yang membuat rincian sederhana seperti, apa yang harus diproduksi dan dialokasikan, bagaimana cara memproduksi dan mengalokasikan sumber daya, serta bagaimana cara mendistribusikan sumber daya dan hasil produksi.² Sistem kapitalisme mulai berkembang di Inggris pada abad 18 M dan kemudian menyebar luas ke kawasan Eropa Barat laut dan Amerika Utara hingga ke Asia Tenggara

Adalah Indonesia negara yang baru merdeka di Asia Tenggara yang dihadapkan pada pilihan jalan mana yang akan diambil menjadi ideologi ekonomi negara. Sebagai sebuah negara baru merdeka, Indonesia tentu berada pada posisi yang sulit menentukan untuk memilih. Pada akhirnya Indonesia memutuskan untuk tidak memilih antara barat atau timur. Tapi, merumuskan sebuah ideologi ekonomi baru yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa yaitu sistem ekonomi “**pancasila**”, yang kemudian ditetapkan menjadi ideologi resmi perekonomian Indonesia.

¹ Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 161

² Sjahrir, *Formasi Mikro-Makro ekonomi Indonesia*, (Jakarta, UI Press, 1995), h. 113-114.

Sejarah Kapitalisme Pasar

Sejarah meluasnya kegiatan perusahaan keseluruhan dunia adalah sejarah yang teramat panjang, dan bukannya baru dimulai pada tahun 1960. kegiatan dagang, misalnya, telah ada sejak zaman peradaban kuno, tetapi pada Abad Pertengahan, barulah di Eropa, muncul kegiatan dagang yang teratur lintas Negara, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang sifatnya korporasi swasta, meski seringkali mendapat dukungan dan bantuan yang besar dari pemerintahannya. Pada abad ke-14, para pedagang petualang memperdagangkan wol dan tekstil yang dihasilkan Inggris ke Belanda, Belgia, Luxemburg, dan Negara-negara lain. Selain itu, di Italia, perusahaan-perusahaan dagang dan bank-bank memainkan peran penting dalam kegiatan perdagangan ke seluruh dunia pada masa-masa awal Renaissance. Pada akhir abad ke-14, di Italia, ada sekitar 150 bank yang sudah melakukan kegiatan di berbagai Negara.³ Dalam abad ke-17 dan ke-18 dukungan oleh Negara meluas dengan berdirinya perusahaan-perusahaan dagang besar kolonial, seperti Dutch East India Company, British East India Company, Muscovy Company, Royal Africa Company dan Hudson Bay Company. Semua perusahaan ini memelopori perdagangan berskala besar di wilayah yang kelak menjadi wilayah jajahan yang penting.

Tetapi, penyebaran industri ke seluruh dunialah, sebagai akibat dari revolusi industri, yang paling dekat dengan perusahaan multinasional di zaman modern. Di sini peranan perusahaan Inggris sebagai perusahaan multinasional pertama penghasil barang pabrik tampak jelas. Mula-mula Amerika Utara dan Amerika Selatan membuka peluang untuk penanaman modal yang paling menguntungkan, disusul kemudian oleh Afrika & Australia. Muncul perdebatan apakah “investasi kolonial” dapat dianggap pendahulu penanaman modal asing,

³ Jhon H. Dunning, *Multinational Enterprises and the Global Economy*, (Wokingham, England : Addison-Wesley, 1993) h. 97-98

tetapi yang pasti produksi untuk pasar lokal mulai dengan cara ini. Perkembangan teknik & organisasi setelah tahun 1870-an memungkinkan berbagai jenis barang yang sama dapat dihasilkan di dalam & di luar negeri oleh perusahaan yang sama, eksplorasi & pengelolaan bahan tambang & bahan baku lainnya juga menarik penanaman modal asing dalam jumlah besar.⁴

Namun, salah satu masalah dengan klasifikasi yang berlaku surut seperti itu adalah konsep model “penanaman modal asing” di satu pihak (ada pengendalian dari luar) dan investasi “potofolio” di pihak lain (jual beli surat berharga yang diterbitkan lembaga luar negeri untuk mendapat keuntungan tanpa ikut serta mengendalikan atau mengelola) baru pada tahun 1960-an muncul, bersamaan dengan munculnya istilah MNC (*multinational corporation*). Meski tidak ada klasifikasi data yang konsisten, pada umumnya disepakati, MNC sudah ada dalam ekonomi dunia setelah pertengahan abad ke-19 dan berdiri kokoh tidak lama sebelum Perang Dunia I. kegiatan bisnis internasional tumbuh pesat pada tahun 1920-an ketika perusahaan multinasional yang benar-benar terdiversifikasi dan terintegrasi kokoh, tetapi kemudian menurun selama masa depresi tahun 1930-an, hancur lebur karena perang pada tahun 1940-an, dan bangkit kembali setelah tahun 1950.⁵

Sejarah bangsa-bangsa adalah sejarah perang berbasis kepentingan ekonomi. Perang meliputi perang senjata, perang ekonomi, dan perang budaya. Perang senjata adalah perangnya antar Negara penjajah dalam memperebutkan daerah jajahan yang kaya sumberdaya alam. Perang yang demikian adalah perwujudan dari kerakusan sistem kapitalisme-kolonialisme dalam akumulasi modal melalui peperangan, akibatnya adalah Negara-negara terjajah bangkit rasa nasionalismenya melawan

⁴ *Ibid.*,

⁵ Paul Hirst & Grahame Thompson, *Globalisasi Adalah Mitos*, Jakarta, (Yayasan Obor Indonesia, 2001). h. 31-34.

penjajah dan melahirkan Negara-negara merdeka, yang lazim disebut Negara Sedang Berkembang (NSB).⁶

Kapitalisme sebagai suatu sistem dunia bermula pada akhir abad 15 dan awal abad 16 ketika orang-orang Eropa yang menguasai pengetahuan pelayaran jarak jauh, menghambur keluar dari sudut kecil dunia mereka dan mengarungi tujuh lautan, untuk menaklukan, merampas dan berniaga. Sejak itu kapitalisme terdiri dari dua bagian yang berbeda tajam: di satu pihak ada sejumlah kecil Negara-negara dominan yang memeras, dan di pihak lain, dengan jauh lebih besar Negara-negara yang dikuasai dan diperas. Keduanya terjalin secara tak terpisahkan dan tidak ada kejadian dalam kedua Negara itu yang dapat dimengerti jika dilihat terpisah dari sistem itu yang menjadi sebuah keharusan. Penting untuk menekankan bahwa hal itu benar, baik untuk “*kapitalisme modern*”, dalam arti sistem kapitalisme masa kini, maupun ketika ia masih merupakan kapitalisme merkantilis dari masa sebelum revolusi industri.⁷

Seperti sejarah yang mengalir mengikuti perubahan zaman, pola eksploitasi kapitalisme internasional pun mengalami perubahan wujud eksploitasinya. Pada awal abad ke-16 di Inggris terjadi revolusi industri yang memacu laju perkembangan kapitalisme awal. Proses ini didorong lagi oleh munculnya revolusi Prancis pada tahun 1789, yaitu revolusi yang mengakhiri hegemoni kaum feodal di Eropa Barat dan mendorong matangnya kekuasaan kaum borjuis. Di tangan para

⁶ Lihat Darsono P, dalam *Globalisasi Suatu Strategi Penjajahan Bentuk Baru*, <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=14179>, diakses pada 5 Januari 2017, pukul 11.00 wib

⁷ Paul M Sweezy, *Kapitalisme Modern*, dalam *Kapitalisme: Dulu dan Sekarang: Kumpulan Karangan dari berbagai sumber asing*, (LP3ES, Jakarta, 1987), h. 5

borjuis Eropalah kapitalisme mulai menanamkan kuku eksploitasinya sampai ujung dunia.⁸

Ketika di Eropa Barat terjadi over-produksi akibat maraknya industrialisasi, maka yang kemudian harus dilakukan oleh Negara-negara Eropa adalah ekspansi ke daerah-daerah terbelakang seperti Asia, Afrika, Pasifik dan Amerika. Maka lahirlah pembagian kekuasaan atas wilayah-wilayah tersebut untuk memasarkan hasil industri dari Eropa dan juga untuk mengambil bahan-bahan mentah bagi kepentingan industrialisasi di Eropa. Daerah-daerah ini adalah daerah-daerah yang ketika itu belum mengalami proses perubahan sejarah masyarakat seperti Eropa Barat zaman itu. Karena perubahan kepentingan pula, maka dua Perang Dunia dihasilkan oleh kepentingan kapitalisme internasional, Perang Dunia Pertama pada tahun 1918-1939 dan kemudian Perang Dunia Kedua pada tahun 1940-1945 adalah sejarah nyata di mana kapitalisme Vs kapitalisme berperang untuk menanamkan pengaruhnya terhadap wilayah-wilayah jajahannya. Jadi perang yang dilakukan antara Blok Sekutu dan Blok Fasis adalah perang antara dua kapitalis yang ingin melebarkan sayap eksploitasinya terhadap Negara-negara dunia ketiga.

James Petras mengatakan bahwa globalisasi telah dimulai pada abad 15, yaitu sejak mulai berkembangnya kapitalisme yang ditandai dengan ekspansi, penaklukan dan penghisapan Negara-negara di Asia, Afrika, Amerika Latin dan bahkan Amerika Utara dan Australia oleh kekaisaran global pada waktu itu, Spanyol dan Portugis. Karena itulah globalisasi selalu diasosiasikan dengan imperialisme, yaitu hubungan global yang didasarkan pada akumulasi untuk Eropa, penghisapan dunia ketiga untuk akumulasi dunia pertama.⁹ Menurut

⁸ *Ibid.*,

⁹ Lihat, Links International Journal of Socialist Renewal, No. 7 tahun 1996, h. 59

Pieterse, globalisasi dimulai sejak 1950-an. Menurut Marx dimulai 1500-an dengan tema kapitalisme modern. Wallerstein mencatat mulai 1500-an dengan tema sistem dunia baru. Robertson menilai globalisasi mulai 1870-1920-an dengan tema multidimensional, Giddens tahun 1800-an dengan tema modernitas, dan Tomilson tahun 1960-an dengan tema planetarisasi budaya.¹⁰

Sementara Scholte, menyatakan bahwa globalisasi berlangsung sejak tahun 1960-an, hal ini telah membantu memperluas jangkauan dalam tiga komodifikasi dalam tiga wilayah. *Pertama*, konsumerisme yang terhubung dengan produk-produk global yang diperluas oleh kapitalisme industri. *Kedua*, pertumbuhan lembaga-lembaga yang beroperasi dalam lingkup global (*supra territorial*) seperti *global banking* dan *global securities* sehingga memperluas jangkauan modal uang. *Ketiga*, globalisasi telah mendorong perluasan komodifikasi dalam wilayah baru yang melibatkan informasi dan komunikasi sebagai akibatnya, item-item *software* komputer dan telepon panggil telah menjadi objek akumulasi.¹¹

Sebenarnya sejak Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) berdiri pada tahun 1944 serta GATT (sekarang WTO) pada tahun 1947, praktis dunia sudah memasuki globalisasi ekonomi, karena masalah pembangunan menjadi tanggung jawab internasional. Bank Dunia mengucurkan dana pinjaman berbunga rendah bagi proyek-proyek pembangunan di berbagai Negara untuk memajukan ekonominya, sedangkan IMF memberikan pinjaman bagi Negara-negara yang mengalami kesulitan dalam neraca

¹⁰ Jan Nederveen Pieterse, "Globalization as Hybridization", individu Mike Featherstone et all. Edt, *Global Modernities*, (Sage Publications, London, 1995), h. 47

¹¹ Budi Winarno, "Ekonomi Global dan Krisis Demokrasi", dalam *Jurnal Hubungan Internasional*, Edisi 1, Februari 2004, h. 7

pembayaran luar negeri dan GATT berfungsi untuk mengatur perdagangan global.

Pada fase pasca PD II, strategi ekonomi politik yang dilancarkan oleh AS dan para sekutunya adalah strategi *Developmentalisme*.¹² (pembangunanisme), untuk mengamankan investasi modalnya, kapitalisme internasional memberikan dukungan bagi orang-orang kuat di sejumlah negara dunia ketiga yang berasal dari jajaran militernya. Di Amerika Latin kita jumpai sejumlah regime yang dipimpin oleh militer (otoriter), di Asia Tenggara dan Selatan juga dijumpai regime otoriter yang kebanyakan dipimpin oleh militer. Militer pada zaman ini adalah anak emas yang dibesarkan oleh kapitalisme dengan tujuan mengamankan investasi modal. Pada fase ini (1960-1970-an).¹³ dekolonisasi ditawarkan pada sejumlah Negara-negara jajahan Eropa Barat dan Amerika Serikat di Asia, Afrika dan Pasifik serta sebagian Negara-negara Amerika Latin.

Setelah perang dingin berakhir, komunis runtuh, Uni Sovyet pudar dan blok komunisme hancur, secara riil AS menghadapi musuh barunya: Negara-negara Eropa. Kelompok politik dan ekonomi ini telah menjadi musuh baru AS, sebab di satu sisi mereka memang mempunyai kemampuan untuk menyaingi AS dalam perdagangan dunia. Di sisi lain, Negara-negara Eropa itu telah mulai bergerak untuk menggabungkan Negara-negara Eropa Timur ke dalam Uni Eropa setelah

¹² Dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan menjadi pembangunanisme. *Developmentalisme* adalah sebuah istilah ekonomi-politik. Sebuah konsep atau kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat yang dicetuskan pada masa Presiden Harry S Truman pada tahun 1949 untuk menjawab berbagai permasalahan kemiskinan atau keterbelakangan (*Underdevelopment*) yang terjadi di Negara-negara dunia ketiga, sekaligus sebagai alat ideologi untuk membendung sosialisme.

¹³ Fase di mana dekolonisasi ditawarkan bagi dunia ketiga dan terjadi proses eksploitasi kapitalisme dari yang bersifat kolonistik kepada fase yang bersifat lunak

Negara-negara itu berpindah dari sosialisme ke sistem kapitalisme.

Pergeseran dan perubahan konstelasi politik internasional itu telah mendorong AS untuk mengumumkan kelahiran Tata Dunia Baru. Prinsip utama Tata Dunia Baru di bidang ekonomi, tak lain adalah perdagangan bebas dan pasar bebas. Prinsip ini dimaksudkan untuk menjamin terbukanya pasar dunia bagi perdagangan dan pendapatan AS. Untuk mewujudkan strategi ekonominya ini, AS berupaya memperlemah dan memperlambat gerak pasar bersama Eropa dengan membentuk blok-blok perdagangan baru, menghidupkan kesepakatan-kesepakatan lama dan mengaktifkan kembali, mendirikan NAFTA yang beranggotakan Canada, AS, dan Mexiko dan juga, membentuk APEC.¹⁴

Pada bulan November 1992, atas undangan Presiden Clinton, telah diadakan pertemuan puncak untuk membentuk organisasi kerjasama ekonomi bagi Negara-negara Asia Pasifik itu (APEC). Pendirian organisasi ini bertujuan untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas, membuka pasar-pasar, dan menekan bea masuk. Pendiriannya tidak dimaksudkan untuk mewujudkan kesatuan ekonomi dan mata uang sebagaimana pasar bersama Eropa. Pendirian APEC justru untuk tetap mengamankan pasar Asia Pasifik bagi AS dari persaingannya dengan pasar bersama Eropa.

AS melihat bahwa Uni Eropa merupakan saingan kuat untuk menantang dan menyaingi AS di bidang ekonomi. Alasan-alasan AS itu adalah: *Pertama*, kesatuan Eropa secara politik dan ekonomi. *Kedua*, Eropa memiliki kemampuan bersaing di bidang perdagangan, sebab Eropa mempunyai kemampuan tinggi dalam produksi barang dan jasa. *Ketiga*, setelah berakhirnya perang dingin dan hancurnya Uni Sovyet, lenyaplah momok komunisme yang sebelumnya digunakan AS untuk

¹⁴ *Ibid.*,

mengancam Eropa. Eropa seluruhnya lalu berkonsentrasi dan bersiap-siap dengan serius untuk terjun ke dalam kancah ekonomi internasional. Diantara persiapan Eropa nampak dari fakta bahwa seluruh Eropa yang merupakan Negara-negara industri yang produktif telah menghilangkan hambatan bea masuk di antara mereka, membuka tapal batas Negara masing-masing untuk memudahkan pemindahan tenaga kerja, dan berusaha mewujudkan kesatuan mata uang.¹⁵

Hal ini kemudian mendorong Eropa untuk memasuki pasar-pasar di Asia dan Afrika, di samping faktor utama bahwa Eropa memang mempunyai kapabilitas untuk bersaing dalam pasar bebas. Di samping itu AS terdorong pula untuk memperkokoh pasarnya di Asia dan Eropa dengan membentuk kelompok-kelompok ekonomi seperti APEC. Dan AS pun dalam hal ini telah sukses pula menunggangi WTO (*World Trade Orgazation*) untuk semakin melicinkan jalannya menguasai ekonomi dunia. APEC mulai muncul ke permukaan sejak tahun 1989 atas prakarsa Australia. APEC menghimpun 17 negara yang berasal dari tiga benua; AS, Canada, Mexico, Australia, Selandia Baru, RRC, Jepang, Hongkong, Papua Nugini, Taiwan, Brunei, Malaysia, Indonesia, Singapura, Philipina, Korea Selatan, dan Thailand. Organisasi ekonomi internasional ini menggabungkan keanggotaan dua kelompok ekonomi besar, yaitu NAFTA yang beranggotakan Negara-negara Amerika Utara, dan ASEAN yang beranggotakan Negara-negara Asia Tenggara.

Negara-negara anggota APEC menguasai 40 % dari keseluruhan volume perdagangan dunia, sekaligus merupakan pasar yang jumlah konsumennya mencapai lebih dari 1 milyar jiwa. Dari seluruh penjelasan tersebut, nampak bahwa AS telah berhasil mencapai target-targetnya untuk merealisasikan prinsip-prinsip yang menjadi landasan ekonominya. AS nampak terus

¹⁵ <http://www.al-islam.or.id/tampil.php?halaman=buletin&id=24>

mengembangkan dan membangunnya hingga stabil dan mantap, bahkan menjadikan prinsip-prinsipnya itu sebagai realitas global yang tidak bisa dihindari lagi. Akan tetapi, terwujud dan terbukanya pasar bebas secara internasional itu, niscaya akan menambah semangat untuk bersaing secara internasional pula. Di samping itu, produksi melimpah dari banyak Negara dan blok ekonomi akan terus melestarikan sikap saling bersaing, mendominasi, dan menguasai, yang didukung oleh kekuatan militer dan perluasan pengaruh untuk melindungi penimbunan-penimbunan produk yang melimpah.

Dalam analisis Friedman, dunia saat ini adalah dalam era globalisasi kedua, yang dimulai sejak tahun 1989 setelah AS, Inggris dkk, memenangkan perang dingin. Jadi setelah era perang dingin itulah tonggak globalisasi dengan tahapan yang lebih massif. Globalisasi kedua hakikatnya adalah suatu proses dunia menjadi satu atap di bawah hegemoni dan dominasi pemenang perang dingin. Negara-negara dunia ketiga atau Negara-negara sedang berkembang mau tidak mau harus menerima kenyataan yang demikian, yaitu menjadi bawahan AS dkk. Thomas L Friedman menyatakan bahwa globalisasi diberi makna modernitas (*the lexis*) di mana masyarakat harus berpersepsi fungsional melalui solidaritas organik,¹⁶ yaitu menempatkan manusia (bangsa) sebagai fungsi manusia lain (bangsa lain) untuk mencapai tujuannya. Lawan dari *the lexis* (modernisasi) adalah *the olive tree* yaitu masyarakat yang berpersepsi mistis, di mana mereka merasa menikmati hidup dalam kungkungan tradisi. *The lexis* adalah symbol dari Negara-negara maju (Canada, AS, Jerman, Italia, Perancis, dan Inggris) dan *the olive tree* adalah symbol dari negara-negara sosialis dan Negara-negara sedang berkembang. *The olive tree*

¹⁶ Thomas L Friedman, *The Lexus and The Olive Tree*, (London : Harper Collins Publisher, 2000), h. 31

harus menyesuaikan diri dengan *the lexis*, jika mereka ingin tetap eksis.¹⁷

Sistem Ekonomi Pancasila

Ekonomi Pancasila adalah sebuah sistem perekonomian yang didasarkan pada lima sila dalam Pancasila. Istilah Ekonomi Pancasila baru muncul pada tahun 1967 dalam suatu artikel yang ditulis oleh Dr. Emil Salim.¹⁸ Ketika itu belum begitu jelas apa yang dimaksud dengan istilah itu. Istilah itu menjadi lebih jelas ketika pada tahun 1979, Emil Salim membahas kembali yang dimaksud dengan "Ekonomi Pancasila". Pada esensinya, Ekonomi Pancasila adalah suatu konsep kebijaksanaan ekonomi, setelah mengalami pergerakan seperti bandul jam dari kiri ke kanan, hingga mencapai titik keseimbangan. Ke kanan artinya bebas mengikuti aturan pasar, sedangkan ke kiri artinya mengalami intervensi negara dalam bentuk perencanaan terpusat.¹⁹ Secara sederhana, Ekonomi Pancasila dapat disebut sebagai sebuah sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau "ekonomi pasar terkendali". Mungkin ada istilah-istilah lain yang mendekati pengertian "Ekonomi Pancasila", yaitu sistem ekonomi campuran, maksudnya campuran antara sistem kapitalisme dan sosialisme atau *sistem ekonomi jalan ketiga*.²⁰

Ekonomi Pancasila disebut juga sebagai ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, kegotong-royongan dan kerjasama. Ini adalah nilai-nilai tradisional yang bersumber pada budaya

¹⁷ Anthony Giddens, *Run Way World: Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 5

¹⁸ Emil Salim, *Kembali Kejalan Lurus : Esai-esai 1966-99*, dalam Penyunting Hamid Basyaib dan Hamid Abidin, (Jakarta : AlvaBet, 2000), h. 5

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Emil Salim, *Sistem Ekonomi Pancasila*, dimuat harian Kompas, 30 Juni 1966

Indonesia. Tapi asas kekeluargaan ini, yang berdasarkan kepada solidaritas mekanis, telah ditransformasikan menjadi solidaritas fungsional, dengan nilai-nilai individualitas dalam lembaga koperasi. Jika itu ciri Ekonomi Pancasila maka ini tergolong dalam aliran Merah Muda atau Nordic. Lagi pula, sistem koperasi yang dibawa oleh Hatta, dipelajarinya ketika ia berkunjung ke negara-negara Skandinavia pada tahun 1926 bersama-sama dengan Dr. Samsi. Selain itu, pasal 33 UUD 1945, menyebutkan bahwa cabang-cabang penting kebutuhan rakyat dikuasai oleh negara, sehingga melahirkan BUMN. Jika ini juga ciri Ekonomi Pancasila, maka Ekonomi Pancasila mengikuti model negara kesejahteraan Eropa Barat. Hal ini lebih menegaskan, bahkan Ekonomi Pancasila tergolong ke dalam aliran Merah Muda. Peranan negara dalam wujud perencanaan pusat (*central planning agency*) yang dilembagakan dalam Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang masih terus bekerja hingga sekarang, menunjukkan pula bahwa Ekonomi Indonesia mengambil unsur Merah. Namun, Indonesia juga mengakui peranan sektor swasta termasuk asing. Pada masa Ekonomi Terpimpin (1960-1965) mulai berkembang perusahaan-perusahaan swasta besar. Pada masa Orde Baru (1966-1998), sangat menonjol peranan konglomerasi dan perusahaan-perusahaan multinasional hingga sekarang. Indonesia juga menganut rezim devisa bebas dan perdagangan bebas dengan luar negeri. Ini merupakan ciri aliran Biru. Tidak terlalu salah jika Ekonomi Indonesia (yang sebagian menyimpang dari Pancasila) sebagai realitas ekonomi, merupakan kombinasi dari aliran Merah dan Biru dan Hijau sehingga menjadi aliran Merah Muda. Cuma dalam aliran Merah Muda Galtung, warna-warna itu adalah warna-warna yang lemah atau kombinasi yang lemah dari tiga warna itu. Di sini kita melihat adanya kontradiksi antara Ekonomi Pancasila dan realitas Ekonomi Indonesia. Itulah maka, Mubyarto, Sri-Edi

Swasono dan Sritua Arief, melakukan kritik yang tajam terhadap realitas Ekonomi Indonesia yang bercorak kapitalis.²¹

Ekonomi Pancasila merupakan hal pokok dari sistem ekonomi Indonesia yang telah diamanatkan dalam Konstitusi UUD 1945. Suatu sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Beberapa prinsip dasar yang ada tersebut antara lain berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan, dan keadilan.²²

Meskipun rezim politik Orde Baru telah berhasil ditumbangkan, namun rezim reformasi tampaknya belum mampu menggantikan tatanan ekonomi kapitalis-neolib yang masih begitu solid bercokol di negeri ini. Sistem ekonomi Pancasila yang diidealisasikan nyatanya belum diterima sepenuh hati, baik dalam gagasan maupun dan terutama dalam tindakan praktik-praktik ekonomi sehari-hari. Meski diakui bahwa kesadaran akan bangkitnya ekonomi Pancasila terus tumbuh, namun tidak sedikit pihak-pihak yang masih belum percaya dan bahkan menanggapi ini secara sinis. Masih ada pihak yang menyangsikan dan mempertanyakan bagaimana sebenarnya model konkret dari sistem ekonomi Pancasila itu?

Ideologi Koperasi diantara Ideologi Kapitalis dan Sosialis

Sebelum membahas koperasi sebagai sebuah ideologi, ada baiknya kita flash back pada dua ideologi besar sepanjang sejarah yang menjadi kerangka dasar perekonomian dunia yaitu kapitalisme dan sosialisme. Dalam ideologi kapitalisme, yang berkembang adalah persaingan. Demi persaingan, produktivitas

²¹ Dawam Raharjo, *Ekonomi Pancasila Dalam Tinjauan Filsafat*, dalam http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/My%20Web/sembul12_2.htm diakses pada tanggal 2 Januari 2017, pukul 10.00

²² *Ibid.*,

produksi harus ditingkatkan terus menerus. Artinya, biaya produksi perlu ditekan serendah mungkin sehingga hasilnya dapat dijual semurah mungkin dan dengan demikian menang terhadap hasil produksi saingan²³.

Dengan adanya tuntutan kenaikan produktivitas, kaum buruh sebagai ujung tombak proses produksi akan merasa eksistensinya mulai hilang karena dituntut untuk memenuhi target produksi yang semakin besar. Hal inilah yang akan memunculkan kesadaran dan perasaan senasib seperjuangan untuk bersama-sama memperjuangkan kemakmurannya sendiri dengan jalan bersatu dalam sebuah perserikatan "kaum proletar". Pertanyaannya sekarang adalah, dimanakah keberpihakan penguasa dalam konteks ini? dan apakah tidak mungkin pemilik modal menaikkan gaji buruh untuk menaikkan produktifitas?

Penganut kapitalisme juga berpendapat bahwa apa yang dijanjikan penganut sosialisme akan adanya kemakmuran bersama adalah sebuah kemustahilan. Penganut sosialisme yang menekankan bahwa manusia dapat dibentuk untuk menjadi makhluk sosial yang mau bekerja untuk orang lain tanpa menekankan imbalan material adalah sebuah cita-cita yang utopis. Bagi penganut kapitalisme, manusia pada dasarnya adalah makhluk yang haus akan kekayaan material dan akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kemakmuran sebesar-besarnya. Lalu dimanakah letak esensial perjuangan masing-masing penganut ideologi tersebut?

Ideologi kapitalisme konservatif yang menghalalkan monopoli dan mengedepankan prinsip *laissez faire* mulai ditinggalkan. Penganut kapitalisme mulai merekonstruksi ulang konsep dasar kapitalisme dengan mengedepankan idealisme "demokrasi", sama-sama untung tanpa mengganggu eksistensi masing-masing sebagai cita-cita pengaturan hidup sosial politik

²³ Franz Magnis, *Pemikiran Karl Marx*, h 165.

yang fair dan berpijak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi secara global.

Sedangkan dalam ideologi sosialisme yang lebih ditekankan adalah kepemilikan bersama, tatanan sosial yang sama, produksi harus diatur bersama, terbentuknya lingkungan sosial yang membentuk manusia menjadi lebih baik dan perlunya komunitas-komunitas harmonis “phalansterium”.²⁴

Bagi penganut sosialisme yang cenderung komunis, yang paling penting adalah bagaimana setiap orang memberi sesuai dengan kemampuannya dan menerima sesuai dengan karyanya²⁵. Dengan demikian penganut sosialisme ingin menunjukkan bahwa “kesadaran kelas” masih layak untuk di kedepankan sebagai sarana perjuangan.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, sosialisme runtuh dan hanya menjadi sebuah idealisme belaka yaitu idealisme tentang kesama-rataan (equality) dan sebuah perlawanan “ideologis” terhadap gencarnya tekanan ideologi kapitalisme. Penganut sosialisme di buat malu dengan adanya kecenderungan totaliter pada negara-negara sosialis. Kapitalisme menang karena bisa mengubah idealisme ekonomi konservatif menjadi idealisme ekonomi modern yang “berusaha” populis dan mampu menyerap demokrasi secara berlahan-lahan dan meletakkannya sebagai alat untuk menguasai semua keinginan dan kebutuhan masyarakat. Lebih dari itu, kapitalisme telah mampu menciptakan masyarakat baru yang berbasis pada lembaga korporasi. Lalu di manakah keberadaan ideologi koperasi di antara kedua ideologi ini?

²⁴ Lihat Franz Magnis, *Pemikiran Karl Marx*, h. 29 yang dimaksud Phalansterium adalah pemukiman-pemukiman agraris kecil mandiri, yang hidup dari pertanian dan pertukangan, dan memproduksi segala kebutuhan mereka sendiri.

²⁵ Stenley Moore, *Marx on the choice between Socialism and Comunism*, (Cambridge : Mass., Harvard University Press, 1980), h. 30

Koperasi yang menganut prinsip gotong royong, kemandirian, keadilan dan kesetaraan hak sesama anggota menempatkan koperasi sebagai alternatif bagi tumbuhnya suatu bentuk perekonomian yang mengakomodir cita-cita masyarakat untuk memperoleh kemakmuran bersama tanpa meninggalkan aspek-aspek solidaritas, hak asasi dan demokrasi. Dari sini jelas bahwa ideologi koperasi menyerap esensi dari kedua ideologi sebelumnya.²⁶

Pertama, Koperasi, sebagai sebuah ideologi berperan untuk menggali potensi masyarakat secara mendasar dengan cara mengusahakan kebutuhan secara bersama-sama dan memanfaatkannya untuk kepentingan dan kemakmuran bersama pula.

Kedua, koperasi sebagai sebuah ideologi menempatkan diri sebagai organisatoris bagi anggotanya dalam mengelola modal usaha yang dikumpulkan dari simpanan anggota atau pinjaman modal dari badan usaha lainnya dan kemudian mengelolanya dalam manajemen finansial dan organisasi yang baik dan profesional.

Ketiga, koperasi sebagai sebuah ideologi mengembangkan prinsip-prinsip dasar koperasi tidak hanya sebagai ketentuan baku semata tetapi benar-benar menjiwai setiap gerak langkah koperasi dalam menggali potensi kultural dan mengembangkan potensi ekonomi maupun sosialnya.

Keempat, koperasi sebagai sebuah ideologi menganalisa dan mengelola setiap kelemahan agar menjadi kekuatan, ancaman menjadi sebuah peluang dan menentukan sasaran sebagai tujuan berdasarkan fakta empiris yang dialami sebelumnya hingga kemudian mampu merumuskan rencana

²⁶ Y. Haryoso, *Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan*, (Yogyakarta : Pustaka Widyatama bekerjasama dengan Universitas Sanata Darma, 2006), h. 55-56

strategis dan merealisasikannya menjadi sebuah aksi konkret untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Kelima, koperasi sebagai sebuah ideologi membangun relasi dengan koperasi lain atau pelaku usaha lain untuk membuka peluang usaha yang lebih besar. Disinilah *cooperative network* (jaringan koperasi) mulai terbentuk. Jaringan kerja sama sebagai penggerak perkembangan koperasi dapat juga berfungsi untuk bertahan dari penetrasi pelaku ekonomi lain yang memiliki daya saing lebih kompetitif.²⁷

Kemudian diperjelas pula oleh Thoby Mutis bahwa untuk memacu sinergi dan rasionalitas diperlukan kerjasama antar koperasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ; penghematan biaya, pemanfaatan modal, spesialisasi, keorganisasian, fleksibilitas dan pemekaran kesempatan kerja²⁸.

Keenam, koperasi sebagai sebuah ideologi membangun kesinambungan dengan cara meningkatkan pendidikan anggota sebagai penggerak koperasi (*cooperative animator*) dan melihatnya sebagai suatu learning process dalam koperasi dari waktu ke waktu.

Ketujuh, koperasi sebagai sebuah ideologi dituntut dapat memberi tempat bagi anggotanya untuk bergerak, mendapatkan kesadaran akan posisi dan keberadaannya sehingga loyalitas dan solidaritas benar-benar mengakar dan tumbuh menjadi semangat dalam mengembangkan koperasi. Koperasi sebagai organisasi ekonomi berwatak sosial (*social content*) yang menggarap the mutual interest(s) anggotanya dan memiliki semangat mutual assistance harus dapat menempatkan setiap kegiatan ekonominya bukan hanya pada prinsip sukarela yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemasyarakatan saja tetapi untuk mempertahankan keberadaannya sebagai sebuah unit

²⁷ *Ibid.*, h. 60

²⁸ Thoby Mutis, *Pengembangan Koperasi : Kumpulan Karangan*, (Jakarta ; Grasindo, 1992) h. 47

usaha bersama. Koperasi perlu membangun kerangka perkembangan dan pertumbuhan usahanya atas dasar organisasi ekonomi agar dalam persaingan dengan bentuk usaha lainnya tidak mengalami kemunduran.

Koperasi di tengah derasnya arus liberalisasi ekonomi

Koperasi sebagai badan usaha non-profit sejak awal harus mempersiapkan strategi usaha yang tidak hanya berorientasi pada service oriented (maksimalisasi pelayanan) dan kemakmuran secara merata bagi anggotanya saja tetapi koperasi juga harus mulai menata usahanya baik dalam hal infrastruktur keuangan, efisiensi, pembangunan akses pasar baru, berinovasi serta penataan terhadap investasi (modal pinjaman dari lembaga lain) yang memberikan nilai tambah kegunaan yang lebih tinggi. Koperasi harus mampu menggerakkan marketing synergy untuk meningkatkan produktivitas dan membuka bidang usaha strategis yang memiliki asas manfaat lebih tinggi untuk kebutuhan anggota dan masyarakat.²⁹ Disinalah dituntut kejelian pengurus koperasi untuk menetapkan bentuk usaha yang mampu mengakomodir berbagai potensi partisipasi yang diberikan anggotanya. Hanya koperasi yang mampu mensinergikan kemampuannya dengan tuntutan kebutuhan masyarakatlah yang akan eksis dalam persaingan kapitalisme global. Sebagai contoh, koperasi harus mulai menata orientasi usaha dan memaksimalkan potensi setiap bidang usahanya menjadi bentuk koperasi yang akomodatif dan mampu mengakomodir setiap peluang usaha kedalam sub-sub koperasi yang telah terbentuk. Misalkan dengan mengoptimalkan setiap bangunan koperasi yang sudah ada baik koperasi pembelian (purchasing cooperative), koperasi pemasaran (marketing cooperative), koperasi konsumen

²⁹ Djabaruddin Djohan (ed), *Koperasi Ditengah Arus Liberalisasi Ekonomi*, (Jakarta :Yayasan Formasi, 1997), h.114

(consumer cooperative), dan koperasi produsen (productive cooperative). Dengan spesifikasi bentuk koperasi tersebut diharapkan koperasi mampu mengambil peran seperti yang dilakukan oleh perusahaan swasta dan BUMN sehingga koperasi tidak menjadi subsistem di bawah perusahaan swasta dan BUMN dalam perekonomian nasional.

Lalu pertanyaannya adalah, seberapa besar kekuatan jaringan koperasi (cooperative network) dalam mengimbangi tekanan dari liberalisasi ekonomi dalam suatu kawasan ekonomi tertentu?

Thoby Mutis dalam bukunya *Pengembangan Koperasi* mengungkapkan adanya tujuh peluang koperasi untuk bergerak maju sebagai salah satu pelaku besar dalam kancah liberalisasi ekonomi. Dengan komponen perubahan yang ditawarkan ini, koperasi diharapkan mampu mengambil peran dalam konstelasi ekonomi global yang berorientasi pada liberalisasi ekonomi. Komponen-komponen tersebut adalah Pertama, perlunya pemurnian partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan, perencanaan, kontrol dan adanya deofisionalisasi yang tuntas sehingga peranan pemerintah hanya sebatas sebagai fasilitator dalam pengembangan koperasi. Kedua, peningkatan peran koperasi dalam memacu pertumbuhan koperasi dengan menggerakkan sumber daya serta informasi. Ketiga, mutu cooperativism dalam koperasi perlu ditingkatkan. Keempat, koperasi harus mampu meraih brain gain yang memadai untuk memacu cooperative entrepreneurial dan teknologi koperasi (tehnocoop). Kelima, memelihara iklim bisnis yang kondusif dan menjalin kemitraan dengan pelaku usaha lainnya yang lebih baik dan menempatkan koperasi sebagai subyek atau pelaku usaha. Keenam, mengembangkan peluang bisnis koperasi. Ketujuh, kompatibilitas bisnis yang dipicu oleh koperasi yang memiliki jaringan dengan aneka bisnis di sektor informal dan

formal.³⁰

Liberalisasi ekonomi memang tidak bisa terelakkan, persaingan global menuntut setiap negara mempersiapkan infrastruktur ekonominya untuk bisa bersaing dengan kompetitor dari negara lain. Batas-batas antar negara sudah luntur akibat globalisasi ekonomi. Investasi dalam berbagai bidang usaha dari luar negeri menuntut setiap pelaku usaha mulai mempersiapkan manajemen usahanya lebih berorientasi jangka panjang. Dunia telah menjadi uji coba bagi ideologi kapitalisme untuk meyakinkan para pelaku ekonomi tentang seberapa besar kuat negara-negara mampu mempertahankan bangunan ekonominya ditengah tekanan liberalisasi ekonomi.³¹

Baik perusahaan swasta, BUMN dan koperasi, saat ini dituntut untuk menentukan berbagai planning jangka panjang. Tidak mustahil bila suatu saat nanti kita akan menjadi rakyat jajahan di negara sendiri. Kapitalisme global telah merambah diberbagai bidang, mulai dari ekonomi, politik, sosial, pendidikan bahkan pertahanan.

Sebuah tawaran untuk menata kembali kesiapan koperasi menghadapi kompetitor baru dalam perekonomian global adalah berorientasi jangka panjang dan mengelola sumber daya intern secara maksimal. Koperasi diharapkan mampu untuk, pertama, menentukan skala prioritas. Disini koperasi harus mampu memilih dari berbagai peluang usaha yang ada dan mengutamakan peluang yang paling prospektif dan bermanfaat untuk jangka panjang. Kedua, menciptakan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat, pelayanan jasa dan kemampuan mengelola sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan usahanya. Ketiga, melakukan perencanaan yang matang sebelum memulai pengembangan usaha dan

³⁰ *Ibid.*, h. 62-63

³¹ Thoby Mutis, *Pengembangan Koperasi : Kumpulan Karangan*, h.53

mempersiapkan sumberdaya yang ada dengan kompetensi yang tinggi sesuai bidang masing-masing.

Perencanaan ini menjadi sangat penting karena ; a). perencanaan yang terarah memungkinkan untuk mencapai tujuan dan sasaran usaha secara maksimal. b). perencanaan pada prinsipnya menyangkut pemilihan terhadap berbagai alternatif pilihan sehingga perencanaan harus mengarah pada efisiensi. c). perencanaan akan mendorong analisa dan hipotesis yang tepat terhadap setiap perubahan dan gejala perubahan yang mungkin timbul. d). perencanaan akan menghasilkan gambaran yang menyeluruh dari berbagai faktor penting yang muncul dan memberikan pemahaman secara integral terhadap kemungkinan perubahan strategi.³²

Kekuatan jaringan koperasi dalam mengimbangi tekanan dari liberalisasi ekonomi dapat dibuktikan bila koperasi benar-benar telah mampu memberdayakan kekuatan dan peluang dari eksternal maupun internal secara baik. Strategi yang ditawarkan diatas tidak akan mampu dicapai apabila koperasi belum bisa menemukan bentuk pengelolaan dan pemberdayaan yang tepat. Hal ini penting karena liberalisasi ekonomi tidak hanya mengambil seluruh peran yang seharusnya mampu dikelola koperasi tetapi dapat menghancurkan koperasi secara keseluruhan dalam perekonomian global. Maka dari itu, penting untuk semakin mempertegas orientasi, perencanaan dan memaksimalkan pelaksanaan strategi dan perencanaan yang sudah ada agar dapat berjalan secara dinamis dan terprogram.

Kesimpulan

Di era glabalisasi ini arus perubahan Negara-negara di dunia telah mengarah kepada homogenisasi paradigma kehidupan, yaitu universalisasi liberalisme. Di bidang politik, demokrasi liberal telah menjadi wacana utama, sedangkan di di

³² Thoby Mutis, *Pengembangan Koperasi : Kumpulan Karangan*, h. 65
456 Volume 28 Nomor 2 Juli-Desember 2017

bidang ekonomi, ekonomi neoliberal yang bertumpu pada kapitalisme global menjadi arus utama.

Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang telah mulai berkenalan dengan kapitalisme global seiring dengan perekonomian era Orde baru yang menjadikan paradigma pertumbuhan ekonomi (economic growth) menjadi panglima. Dan merepakan Sistem Ekonomi Pancasila yang berisi aturan main kehidupan ekonomi yang mengacu pada ideologi bangsa Indonesia. Dalam sitem Ekonomi Pancasila, pemerintah dan masyarakat memihak pada (kepentingan) ekonomi rakyat sehingga terwujud kemeralatan sosial dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Inilah sistem ekonomi kerakyatan yang demokratis yang melibatkan semua orang dalam proses produksi dan hasilnya dinikmati oleh semua warga orang dalam proses produksi dan hasilnya dinikmati oleh semua warga masyarakat.

Koperasi sebagai sebuah ideologi sebenarnya memiliki kompetensi yang tinggi untuk bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya apabila mampu mensinergikan, mengoptimalkan dan memanfaatkan sesuai dengan proporsi dan kapabilitas masing-masing bidang usaha untuk bersama-sama memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk meningkatkan kemakmuran anggota dan masyarakat. Sendi-sendi dasar koperasi yang mencerminkan keberpihakan dalam pencapaian pertumbuhan dan pemerataan kemakmuran masyarakat, diharapkan tidak hanya sekedar idealisme belaka tetapi benar-benar mampu menjadi soko guru ekonomi yang profesional dan mandiri. Satu hal yang harus dikedepankan koperasi adalah menjadi pelaku ekonomi yang tidak menjadi subsistem dari pelaku ekonomi lainnya tetapi dapat tumbuh sejajar dan mampu mengambil peran secara tepat dan mampu membangun sebuah perencanaan strategis yang konstruktif dan visioner.

DAFTAR PUSTAKA

- Djohan, Djabaruddin, (ed), *Koperasi Ditengah Arus Liberalisasi Ekonomi*, (Jakarta :Yayasan Formasi, 1997)
- Darsono P, dalam *Globalisasi Suatu Strategi Penjajahan Bentuk Baru*, <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=14179>, diakses pada 5 Januari 2017, pukul 11.00 wib
- Dunning, Jhon H, *Multinational Enterprises and the Global Economy*, (Wokingham, England : Addison-Wesley, 1993)
- Friedman, Thomas L, *The Lexus and The Olive Tree*, (London : Harper Collins Publisher, 2000)
- Giddens, Anthony, *Run Way World: Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2000)
- Haryoso, dkk, *Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan*, (Yogyakarta : Pustaka Widyatama bekerjasama dengan Universitas Sanata Darma, 2006)
- Hirst, Paul, *Globalisasi Adalah Mitos*, Jakarta, (Yayasan Obor Indonesia, 2001)
- Moore, Stenley, *Marx on the choice between Socialism and Comunism*, (Cambridge : Mass., Harvard University Press, 1980)
- Mutis, Thoby, *Pengembangan Koperasi : Kumpulan Karangan*, (Jakarta ; Grasindo, 1992)
- Pieterse, Jan Nederveen, “*Globalization as Hybridization*”, individu Mike Featherstone et all. Edt, *Global Modernities*, (Sage Publications, London, 1995)

- Raharjo, Dawam, *Ekonomi Pancasila Dalam Tinjauan Filsafat*, dalam http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/My%20Web/sembul12_2.htm diakses pada tanggal 2 Januari 2017, pukul 10.00
- Salim, Emil, *Kembali Kejalan Lurus : Esai-esai 1966-99*, dalam Penyunting Hamid Basyaib dan Hamid Abidin, (Jakarta : AlvaBet, 2000)
- _____, *Sistem Ekonomi Pancasila*, dimuat harian Kompas, 30 Juni 1966
- Suseno, Franz Magnis, *Pemikiran Karl Marx Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005)
- Sjahrir, *Formasi Mikro-Makro ekonomi Indonesia*, (Jakarta, UI Press, 1995)
- Sweezy, Paul M, *Kapitalisme Modern*, dalam *Kapitalisme: Dulu dan Sekarang: Kumpulan Karangan dari berbagai sumber asing*, (LP3ES, Jakarta, 1987)
- Winarno, Budi, “*Ekonomi Global dan Krisis Demokrasi*”, dalam *Jurnal Hubungan Internasional*, Edisi 1, Februari 2004